



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahunan Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada per 31 Desember 2024 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 311.470,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara Semester II / Tahunan pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 154.903.534.760,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 155.051.437.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 11.887.938.023,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 5.128.550.870,- dan Piutang Jangka Panjang sebesar Rp. 0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 17.533.987.529,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah

sebesar Rp. 162.363.266.974,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (162.363.266.974,-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,- dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (162.363.266.974,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 37.226.280.530,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (162.363.266.974,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 141.910.561.794,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 16.907.474.670,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN
31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024		% THD ANGG	31 DESEMBER 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	311.470	0,00	80.334.040
JUMLAH PENDAPATAN		-	311.470	0,00	80.334.040
Belanja					
Rupiah Murni		155.051.437.000	154.903.534.760	100	41.273.148.622
Belanja Pegawai	B.2	2.449.883.000	2.438.865.526	100	2.386.868.322
Belanja Barang	B.3	152.104.688.000	151.968.687.384	100	37.741.108.900
Belanja Modal	B.4	496.866.000	495.981.850	100	1.145.171.400
Pinjaman dan Hibah					0
Belanja Pegawai	B.5				-
Belanja Barang	B.6				0
Belanja Modal					0
JUMLAH BELANJA		155.051.437.000	154.903.534.760	98	41.273.148.622

Sumber :KPU Kota Tangerang

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



II. NERACA

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
NERACA (KOMPARATIF)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
Aset Lancar				
Kas Lainnya dan Setara kas	7.707.121.443	24.401.368.468	7.707.121.443	0
Belanja dibayar di muka	2.432.500.000	3.454.000.000		
Persediaan	1.748.316.580	4.405.935.136	(2.657.618.556)	0
Jumlah Aset Lancar	11.887.938.023	32.261.303.604	11.887.938.023	
Aset Tetap				
Tanah	2.947.500.000	2.947.500.000		0
Peralatan dan Mesin	3.588.125.069	3.260.383.069	327.742.000	54.14
Gedung dan Bangunan	980.021.850	691.200.000	-	0
Akumulasi Penyusutan	(2.387.096.049)	(1.980.759.124)	(269.727.097)	15.69
Jumlah Aset Tetap	5.128.550.870	4.918.323.945	210.226.925	21.70
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	15.000.000	-	15.000.000	0
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	464.740.450			
Aset Lain-Lain	802.993.250	802.993.250	-	0
Akumulasi Penyusutan/Amortasi Aset Lainnya	(285.494.614)	(751.706.376)	466.211.762	1.85
Jumlah Aset Lainnya	517.498.636	51.286.874	466.211.762	(20.99)
JUMLAH ASET	17.533.987.529	37.230.914.423	(19.696.926.894)	722.12
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang kepada Pihak Ketiga	464.740.450	3.265.425	461.475.025	-100
Utang Jangka Pendek Lainnya	161.772.409	1.368.468	160.403.941	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	626.512.859	4.633.893	621.878.966	(97.26)
Jumlah Kewajiban	626.512.859	4.633.893	621.878.966	(97.26)
Ekuitas				
Ekuitas	16.907.474.670	37.226.280.530	(20.318.805.860)	732.21
JUMLAH EKUITAS	16.907.474.670	37.226.280.530	(20.318.805.860)	732.21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17.533.987.529	37.230.914.423	(19.696.926.894)	732.21

Sumber :KPU Kota Tangerang

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER
2023
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	173.540	74.124.040	74.297.580	0
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	173.540	74.124.040	74.297.580	0
BEBAN				
Beban Pegawai	2.438.865.526	2.336.919.022	101.946.504	
Beban Persediaan	9.718.730.624	-	-	
Beban Barang dan Jasa	138.351.321.114	28.986.538.328	109.364.782.786	
Beban Pemeliharaan	603.429.211	213.981.200	(328.826.429)	
Beban Perjalanan Dinas	10.831.054.886	3.208.020.332	7.623.034.554	
Beban Barang untuk Diserahkan	-	-	0	
Beban Bantuan Sosial	-	-	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	419.865.613	275.309.553	144.556.060	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	(621.000)		
Beban Lain-lain	-	-		
JUMLAH BEBAN	162.363.266.974	35.020.147.435	127.343.119.539	
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(162.363.093.434)	(34.946.023.395)	(127.417.070.039)	
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non lancar	-	-	-	
SURPLUS (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	
beban Penyelesaian kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	131.789.930			
Pendapatan dari Kegiatan Non Oprs.	135.719.930	-	135.719.930	
Beban Dari Kegiatan Non Operasional	3.930.000	-	3.930.000	
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	131.789.930	-	131.789.930	
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	131.789.930	-	131.789.930	
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	-	-		
SURPLUS/DEFISIT LO	(162.231.303.504)	(34.946.023.395)	(127.285.280.109)	



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR KOMISI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN
31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	37.226.280.530	4.055.388.672
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(162.231.303.504)	(34.946.023.395)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	1.935.850	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		1.935.850	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	141.910.561.794	68.116.915.253
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(20.320.741.710)	33.170.891.858
EKUITAS AKHIR	E.6	16.905.538.820	37.226.280.530

Sumber :KPU Kota Tangerang

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil Dan Kebijakan Teknis Kantor KPU Kota Tangerang

Dasar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang merupakan bagian
Hukum dari kelembagaan Komisi Pemilihan Umum. Organisasi dan tata
Entitas dan kerja entitas diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi
Rencana Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
Strategis dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Entitas berkedudukan di Jalan
Nyimas Melati No. 16, Tangerang.

Kantor Komisi Pemilihan Umum didirikan sebagai Lembaga Pemerintah yang mandiri, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang berkomitmen tegas dengan visi **“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang LUBER dan JURDIL”**. Adapun misi yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang professional;
2. Menyusun regulasi Pilkada yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;



3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pilkada bagi seluruh masyarakat pada umumnya, dan para pemangku kepentingan pada khususnya;
 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
 5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
 6. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable;
 7. Mewujudkan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi dengan dukungan pengalaman sebagai penyelenggara pemilu;
 8. Mengoptimalkan sarana pendukung kerja yang memadai untuk mengatasi sumber data pemilih yang tidak akurat;
 9. Menambah pagu anggaran yang belum memadai guna menunjang sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia;
 10. Mengefektifkan, pelaksanaan SOP, menciptakan beban kerja yang professional, dan mencukupi kebutuhan SDM untuk menghindari pendistribusian logistik terkendala kondisi geografis.
- Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang adalah :

1. Terwujudnya lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada;
2. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Tangerang;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam



Pemilu dan Pilkada;

5. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel;
6. Terlaksananya penyampaian informasi Pemilu dan Pilkada melalui teknologi informasi;
7. Terwujudnya sumber data pemilih yang akurat;
8. Terpenuhinya anggaran pelaksanaan Pilkada serta sarana dan prasarana pendukung;
9. Terwujudnya pengelolaan dan pendistribusian logistik yang baik dan tepat waktu.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan



Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun



2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan-LRA

LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas



pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi



diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi criteria sebagai berikut :
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya suratkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:



Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan



publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari



suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun



d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, aset lain-lain, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dapat dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.



Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo



dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pegawai ASN KPU Kota Tangerang berjumlah 13 Orang, calon P3K berjumlah 9 orang dan PPNPN 3 Orang dengan total pegawai sebanyak 25 Orang dan tidak terdapat penambahan pegawai KPU. Dengan rincian Laporan Realisasi Anggaran sbb :



URAIAN JENIS BELANJA	2024	
	Anggaran Awal	Realisasi
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	311.470
Jumlah Pendapatan	-	311.470
Belanja		
Belanja Pegawai	2.449.883.000	2.438.865.526
Belanja Barang	152.104.688.000	151.968.687.384
Belanja Modal	496.866.000	495.981.850
Jumlah Belanja	155.051.437.000	154.903.534.760

Sumber : KPU Kota Tangerang

Realisasi **B.1 Pendapatan**

Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Rp. 311.470 2024 adalah sebesar Rp. 311.470,- atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan di lingkup Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang berasal dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan



Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	0.00
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		-	
2. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Penerimaan kembali persekot/Uang muka gaji		-	
Penerimaan kembali belanja barang tahun yang lalu		-	
- Pendapatan penyelesaian Ganti Kerugian Negara thd Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	-	
Jumlah	-	-	0.00

Sumber : KPU Kota Tangerang

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara Rp.
154.903.534.760,-

Realisasi belanja negara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 154.903.534.760,- atau 100 persen dari anggaran belanja senilai Rp. 155.051.437.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Rupiah Murni (RM)			
Belanja Pegawai	2.449.883.000	2.438.865.526	99,55
Belanja Barang	152.104.688.000	151.968.687.384	99,911
Belanja Modal	496.866.000	495.981.850	99,822
Total Belanja Kotor	155.051.437.000	154.903.534.760	99,905
Pengembalian Belanja			0
Belanja Netto RM	155.051.437.000	154.903.534.760	99,905
Belanja Hibah			
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	0	0	0
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Hibah Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja			0
Belanja Netto Hibah	0	0	0
Total Belanja Negara	155.051.437.000	154.903.534.760	99,905

Sumber : KPU Kota Tangerang



Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Rupiah Murni (RM)			
<i>Belanja Pegawai</i>	2.438.865.526	2.386.868.322	2,18%
<i>Belanja Barang</i>	151.968.687.384	37.741.108.900	302,66%
<i>Belanja Modal</i>	495.981.850	1.145.171.400	-56,69%
Belanja Netto RM	154.903.534.760	41.273.148.622	275,31%
Belanja Hibah			
<i>Belanja Pegawai</i>	-	-	-
<i>Belanja Barang</i>	-	-	-
<i>Belanja Modal</i>	-	-	-
Belanja Netto Hibah	-	-	-
Total Belanja Negara	154.903.534.760	41.273.148.622	275,31%

Sumber : KPU Kota Tangerang

Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022, Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya belanja barang untuk menunjang kegiatan tahapan Pemilu 2024 dan penambahan dana untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin.

*Belanja
Pegawai
Rp.
2.438.865.
526,-*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.438.865.526,- dan Rp. 2.386.868.322,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	683.961.500	632.161.000	8,19
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.913	10.374	5,20
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	42.882.640	39.115.440	9,63
Belanja Tunj.Anak PNS	14.807.844	13.469.422	9,94
Belanja Tunj.Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	-
Belanja Tunj.PPh PNS	19.064.008	1.612.946	-
Belanja Tunj.Beras PNS	35.485.800	35.630.640	(0,41)
Belanja Uang Makan PNS	55.374.000	77.799.000	(28,82)
Belanja Tunj.Umum PNS	20.650.000	21.020.000	(1,76)
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	827.847.526	812.730.500	-
Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	692.131.423	705.439.000	(1,89)
Realisasi Belanja Bruto	2.440.095.654	2.386.868.322	2,23
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(3.162.512)	-

Sumber : KPU Kota Tangerang

*Belanja
Barang Rp.
37.741.10
8.900,-*

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 37.741.108.900,- dan Rp. 2.667.477.238.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dikarenakan semakin banyaknya kegiatan untuk menunjang pelaksanaan Tahapan-tahapan Pemilu 2024.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023



Sumber : KPU Kota Tangerang

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi per 31 Desember 2024	Realisasi per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	41.415.498		#DIV/0!
Belanja Bahan	17.806.475.519		
Belanja output honor kegiatan	51.281.642.000		
Belanja Barang Non Operasional	55.740.875.601	2.733.315.515	193931%
Belanja Barang Operasional	21.000.000	74.967.000	-7199%
Belanja Barang Persediaan konsumsi	3.204.382.173	1.878.569.040	7058%
Belanja Perjalanan Biasa	2.590.680.709	636.205.464	30721%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	553.540.000	622.460.000	-1107%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.388.435.600	1.883.218.000	29233%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	301.514.000	71.926.868	31920%
Belanja Sewa	2.201.233.280	3.943.446.000	
Belanja Jasa	10.139.787.558	770.097.922	121669%
Belanja Pemeliharaan	603.429.211	213.981.200	18200%
Belanja Modal Peralatan dan mesin	192.160.000		
Belanja Modal Gedung dan bangunan	303.821.850		
Jumlah Belanja Bruto	152.370.392.999	12.828.187.009	108778%
Pengembalian Belanja	-	-	-10000%
Jumlah Belanja Bersih	152.370.392.999	12.828.187.009	108778%



Belanja
Modal
Rp.192.16
0.000,-

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 192.160.000,- dan Rp. 495.981.850. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023, hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk belanja modal peralatan mesin untuk menunjang kebutuhan penyelenggaraan tahapan kegiatan Pemilu Tahun 2024.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA		Volume		Harga Satuan	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024
Belanja Modal Tanah					0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
-	PC AIO D240W578-512 AITZXP	11	unit	14.400.000	158.400.000
-	Printer Ecotank L 3210	2	unit	3.300.000	6.600.000
-	Printer Color Laserjet Pro M155A	2	unit	5.530.000	11.060.000
-	BAFO HDMI Splitter 4 Port	1	unit	1.000.000	1.000.000
-	Smart TV HD 32 Inch	1	unit	5.200.000	5.200.000
-	Smart Office PS186	2	unit	4.950.000	9.900.000
	Jumlah			34.380.000	192.160.000

Sumber : KPU Kota Tangerang



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.7.707.121.446,-

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.707.121.446,- dan Rp.24.401.368.468. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari saldo Dana Hibah dan pungutan pajak yang belum di setorkan ke Kas Negara per tanggal neraca serta terdapat dobel setoran pajak di bulan November Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023

N0	Jenis	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Bank BRI Virtual Account No. 651896580701000 BPG 127 SEKRT KPU KOTA TANGERANG	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai (di brankas)	Rp 381.185.100	Rp 1.368.468
3	Bank BRI Virtual Account No. 654086580702900 RPL 127 KPU KOTA TANGERANG	Rp -	Rp -
4	BJB Syari'ah 5040108108108 RPL 127 PDHL KPU KOTA TANGERANG UTK 2YZWSNNA	Rp 7.325.936.346	Rp 24.400.000.000
	Jumlah	Rp 7.707.121.446	Rp 1.368.468

Sumber : KPU Kota Tangerang

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 7.707.121.446,-

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 7.707.121.446,- dan Rp.24.401.368.468.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Terdapat saldo pada Setara kas yaitu saldo dana hibah Pilkada Kota Tangerang Tahun 2024 dan saldo pungutan pajak yang belum atau terlambat dilakukan penyetoran. investasi jangka pendek yang



siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Persediaan **C.2. Persediaan**

Rp. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing
1.748.316.580,- adalah sebesar Rp. 1.748.316.580,- dan Rp. 4.405.935.136,- adalah
0,- barang kebutuhan logistik Pemilu 2024

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023



No	Persediaan	31 Desember 2024
1	Barang Persediaan Konsumsi	
	- Tinta Pilkada 2024	Rp 31.389.600
	- Sampul Kertas Biasa Pilkada	Rp 15.177.387
	- Formulir Plano Pilkada	Rp 14.999.358
	- Kontainer Box Plastik 45 L Pilkada	Rp 3.380.000
	- Kontainer Box Plastik 156 L Pilkada	Rp 63.856.000
	- Alat Bantu Tunanetra Pilkada 2024	Rp 8.659.200
	- Surat Suara Pilkada	Rp 188.098.442
	- Kotak Suara Pilkada	Rp 75.226.800
	- Bilik Pemungutan Suara Pilkada	Rp 62.238.000
	- Salinan Daftar Pemilih Tetap Pilkada	Rp 142.290.900
	- Sampul Kubus Pilkada	Rp 12.336.700
	- Model C6 Pemberitahuan Pilkada	Rp 206.674.200
	- Form C Hasil Salinan (A4) Pilkada	Rp 1.488.300
	- Segel Plastik Pilkada	Rp 40.955.676
	- Alat kelengkapan TPS Pilkada	Rp 546.679.110
	- Sampul C Hasil-KWK Pilkada	Rp 936.276
	- Alat Bantu Tunanetra Pilgub 2024	Rp 5.087.280
	- Sampul Formulir Model C Hasil KWK	Rp 936.276
	- Sampul Kubus Pilgub	Rp 10.215.150
	- Surat Suara Pilgub 2024	Rp 120.043.290
	- Formulir C Hasil Hasil KWK Plano Pilgub 2024	Rp 10.399.158
	- Kotak Suara Pilgub 2024	Rp 75.949.600
	- Bilik Suara Pilgub 2024	Rp 62.238.000
	- Sampul biasa Pilgub 2024	Rp 11.351.061
	- Karet	Rp 37.710.816
	Jumlah	Rp 1.748.316.580

Sumber : KPU Kota Tangerang

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Laporan Persediaan yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik sesuai Berita Acara Stock Opname Persediaan Nomor : 44/RT.01.2-BA/3671/2024 tanggal 31



Desember 2024 Nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca SIMAK-BMN dan Neraca MonSakti telah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara antara Unit Akuntansi Barang dan Unit Akuntansi Keuangan Periode Semester II Tahun Anggaran 2024.

Tanah

C.3. Tanah

Rp.2.947.500.000,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 2.947.500.000,- dan Rp. 2.947.500.000,- Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang mendapatkan Hibah Tanah, Gedung dan Aset lainnya dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang terletak di Jl. Nyimas Melati Nomor 16 Tangerang.

Peralatan dan Mesin

C.4. Peralatan dan Mesin

Rp.3.588.125.069,-

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 3.588.125.069,- dan Rp. 3.260.383.069,-

Gedung dan Bangunan

C.5. Gedung dan Bangunan

Rp.691.200.000,-

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.980.021.850. dan Rp.691.200.000,-. terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2024 dikarenakan adanya pembuatan pagar depan dan belakang Kantor KPU Kota Tangerang.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Renovasi dan pembangunan pos	-
Koreksi pencatatan nilai pengadaan partisi	-
Koreksi pencatatan nilai penambahan daya listrik	-
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp
(2.387.096.049)*

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. (2.387.096.049) dan Rp. (1.980.759.124) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 3.588.125.069	Rp (765.235.064)	Rp 4.353.360.133
2	Gedung dan Bangunan	Rp 980.021.850	Rp (751.706.376)	Rp 1.731.728.226
	Total	Rp 4.568.146.919	Rp (1.516.941.440)	Rp 6.085.088.359



Sumber : KPU Kota Tangerang

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp.0.*

C.7. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.15.000.000,- dan Rp 0,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Terdapat Aset Tidak Berwujud dikarenakan adanya ketidaksesuaian akun dan kode barang Milik Negara berupa Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Renovasi Gerbang Utama dan Pagar KPU Kota Tangerang sehingga terdapat penambahan nilai perolehan Aset Tak Berwujud pada lingkup Kantor Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

*Aset Lain-
Lain Rp.
802.993.250,
-*

C.8. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 802.993.250,- dan Rp 802.993.250,-.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

Sampai dengan laporan per 31 Desember 2024 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap nilai perolehan Aset Lain-lain pada lingkup Kantor Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.



Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.
(765.235.064
)

C.9. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. (765.235.064) dan Rp (751.706.376). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Amortisasi Dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	
Aset Tak Berwujud	Rp 15.000.000	Rp (765.235.064)	Rp 780.235.064	
Aset Lain-Lain	Rp 802.993.250	Rp (751.706.376)	Rp 1.554.699.626	
	Rp 817.993.250	Rp (1.516.941.440)	Rp 2.334.934.690	

Sumber : KPU Kota Tangerang

Uang Muka
dari KPPN
Rp.0

C.10. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp.464.740.4

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 464.740.450,- dan Rp.



50

3.265.425.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Langganan Telepon yang belum dibayar	Rp -	
Belanja Langganan Air yang belum dibayar	Rp -	
Total	Rp -	

Sumber : KPU Kota Tangerang

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp. 0*

C.12. Belanja Dibayar di Muka

Nilai Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.432.500.000,- dan Rp. 3.454.000.000,- Belanja Dibayar di Muka merupakan belanja yang sudah dilakukan pembayarannya yaitu sewa Gudang Logistik Pemilu 2024 dan sewa Gudang logistic Pilkada 2024.

*Beban Yang
Masih Harus
Dibayar Rp.
0*

C.13. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada



tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Pegawai	Rp 2.438.865.526	Rp -
Beban Persediaan	Rp 9.722.660.624	Rp -
Beban Barang dan Jasa	Rp 10.139.787.558	Rp -
Beban Pemeliharaan	Rp 603.429.211	Rp -
Beban Perjalanan Dinas	Rp 10.831.054.886	Rp -
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 419.865.613	Rp -
Total	Rp 34.155.663.418	Rp -

Sumber : KPU Kota Tangerang

Ekuitas Rp. C.14. Ekuitas

37.226.280.350,-

Ekuitas awal per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.37.226.280.530,- dan Rp. 4.055.388.672. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp. 311.470,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 311.470,- dan Rp. 80.334.040,- Pendapatan tersebut terdiri dari :



Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	(100)
Pendapatan Lain-Lain	-	-	(100)
Jumlah Pendapatan	-	-	(100)

Sumber : KPU Kota Tangerang

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.438.865.526,- dan Rp. 2.386.868.322.526,-

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023



URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2023	NAIK (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	683.961.500	632.161.000	8,19
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.545	10.374	1,65
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	42.882.640	39.115.440	9,63
Belanja Tunj.Anak PNS	14.807.844	13.469.422	9,94
Belanja Tunj.Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	-
Belanja Tunj.PPh PNS	19.064.008	1.612.946	1.081,94
Belanja Tunj.Beras PNS	35.485.800	35.630.640	(0,41)
Belanja Uang Makan PNS	55.374.000	77.799.000	(28,82)
Belanja Tunj.Umum PNS	20.650.000	21.020.000	(1,76)
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	827.847.526	812.730.500	-
Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	690.901.663	705.439.000	(2,06)
Realisasi Belanja Bruto	2.438.865.526	2.386.868.322	2,18
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(10.287.427)	-
Realisasiasi Belanja Netto	2.438.865.526	2.376.580.895	2,62

Sumber : KPU Kota Tangerang

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp. 0*

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0.

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023



Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.748.316.580	-	#DIV/0!
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan, materai dan leges	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	9.718.730.624	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	3.930.000	-	#DIV/0!
Jumlah	11.470.977.204	-	#DIV/0!

Sumber : KPU Kota Tangerang

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.139.787.558,- dan Rp. 32.440.537.898,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa Honor Output Kegiatan badan adhoc Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023



Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban keperluan perkantoran	41.415.498	131.481.991	(69)
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	-	24.000	(100)
Beban honor operasional satuan kerja	100.680.000	153.813.000	(35)
Beban barang operasional lainnya	21.000.000	74.967.000	100
Beban bahan	17.800.910.103	2.786.402.139	539
Beban honor output kegiatan	51.281.642.000	21.705.543.000	136
Beban barang non operasional lainnya	55.560.557.001	2.733.315.515	1.933
Beban langganan listrik	167.877.674	122.197.261	37
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-	4.850.000	(100)
Beban langganan air	14.718.000	14.400.000	2
Beban Sewa	3.222.733.280	3.943.446.000	100
Beban jasa profesi	339.100.000	59.400.000	100
Beban jasa lainnya	9.770.687.558	710.697.992	100
Jumlah	138.321.321.114	32.440.537.898	326

Sumber : KPU Kota Tangerang

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah masing-masing sebesar Rp.603.429.211,- dan Rp. 213.981.200. *Beban Pemeliharaan* merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023



Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	408.086.834	91.463.700	346
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	
Beban BBM dan Pelumas Khusus Non Pertamina	-	-	
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	195.342.377	122.517.500	59
Jumlah	603.429.211	213.981.200	182

Sumber : KPU Kota Tangerang

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp. 10.831.054.86,- Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.831.054.886,- dan Rp. 3.208.020.332. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas disebabkan karena banyaknya kegiatan perjalanan dinas terkait rapat koordinasi, Monitoring, Sosialisasi Pilkada dan lain sebagainya. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023



Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.587.565.286	632.465.464	309
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	553.540.000	620.410.000	(11)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.388.435.600	1.883.218.000	292
Beban Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota	301.514.000	71.926.868	319
Jumlah Bruto	10.831.054.886	3.208.020.332	238
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	-	100
Jumlah	10.831.054.886	3.208.020.332	238

Sumber : KPU Kota Tangerang

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2024, tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisas
Rp.419.865.553.*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 419.865.613 dan Rp.275.309.553,-

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi



penurunan manfaat ekonomi untuk Asset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Sumber : KPU

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	389.624.706	255.903.097	52
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	16.712.219	13.824.000	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam operasional perkantoran	13.528.688	13.627.456	-
Jumlah	419.865.613	283.354.553	48

Kota Tangerang

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0*

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp 0 Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja KPU Kota Tangerang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

D.10. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.0,-*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31



Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	100
<i>Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</i>	-	-	-
Pendapatan Dari Keg.Non Operasional Lainnya	-	-	100
Beban Dari Keg.Non Operasional Lainnya	-	-	-
<i>Surplus Dari Keg.Non Operasional Lainnya</i>	-	-	100
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	-	-	#DIV/0!

Sumber : KPU Kota Tangerang

D.11. Pos Luar Biasa

*Defisit Pos
Luar Biasa
Rp.0*

Pos luar biasa terdiri dari pendaptan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan tidak dapat diramalkan, serta berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luas Biasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. atau tidak terdapat pos luar biasa pada Laporan Operasional Tingkat Satker KPU Kota Tangerang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp.37.226.28
0.530,-*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 37.226.280.530,- dan Rp. 4.055.388.672,-.



E.2. Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO Rp.
(162.231.303.
504)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (162.231.303.504) dan (38.408.068.395) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Rp.0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp 0-

Terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp.0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang asset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.



Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

*Kas Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp.0*

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Asset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai perolehan atas asset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-
Lain Rp.0,-*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tidak terdapat Koreksi Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp.141.910.5
61.794,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.141.910.561.794,- dan Rp.68.102.119.928,- Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.



Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	141.910.561.794
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	141.910.561.794

Sumber : KPU Kota Tangerang

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0.

E.4.2 Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 tidak terdapat Transfer Masuk/Transfer Keluar dari KPU RI dan KPU Provinsi Banten pada Tingkat Satuan Kerja KPU Kota Tangerang.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa,



sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Telah di lakukan SP2HL pada bulan Desember 2024 Terdapat Pengesahan Hibah Langsung periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan tidak terdapat Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemerintah Daerah Kota Tangerang	Uang	Rp -
	Tahap Pertama		Rp 24.400.000.000
	Tahap Kedua		Rp 36.738.174.450
Total Pengesahan			Rp 61.138.174.450
Jumlah			Rp 61.138.174.450

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.16.907.474.670,- dan Rp.33.749.440.205.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Jumlah sisa TUP Bulan Januari yang disetor/dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kota Tangerang ke kas Negara sebesar RP 3.670,- (*Tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) dengan No NTPN D3A650JUQI5CUA6I dan Sisa UP yang di setor sebesar Rp 5.850,- (*Lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dengan Nomor NTPN 064946QT9MDVNVHQ tanggal penyetoran 30 Desember 2024. Namun masih terdapat saldo pada kas tunai Bendahara Pengeluaran sampai dengan pertanggal 31 Desember 2024 senilai Rp 381.185.100,- adalah Saldo Kas dana Hibah serta pungutan pajak PPN dan PPH yang belum di setorkan karena keterlambatan pengembalian dan penyetoran pajak sehingga menjadi Saldo pada kas tunai Bendahara Pengeluaran



dan akan dilakukan Migrasi saldo awal pungutan pajak di tahun 2025

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kota Tangerang an. Fandu Dwiadma Oktavirawan (NIP.19811013200901003). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024.

Kuasa Pengguna Anggaran	Fandu Dwiadma Oktavirawan (NIP. 19811013200901003)
Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Yunita Ratna Sari (NIP. 198406272009022003)
Pejabat Pembuat Komitmen	Sofwan Rijal (NIP. 197702532009021001)
Bendahara Pengeluaran	Dodi Hendrawan (NIP. 197907302012121003)
Staf Pengelola Keuangan	Sisma Yunita (NIP. 198506302009022009)
Staf Pengelola Keuangan	Novri yanti NIP. 197611202014072001



Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sudah memiliki Aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan yang saat ini ditempati sebagai Kantor Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang sudah di Hibahkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Nyimas Melati No. 16 Kel. Sukarasa Kota Tangerang.

F.5 BERITA ACARA REKONSILIASI

KPU Kota Tangerang telah melakukan Rekonsiliasi internal antara aplikasi sakti dan omspan untuk Periode laporan yang berakhir pada 31 Desember 2024 sehingga menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual.